

AKSELERASI PEMBANGUNAN JAKARTA SMART CITY

Tommy Kurnia¹

¹Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

Informasi Artikel:

Diterima: 11 Februari 2020

Naskah perbaikan: 22 September 2020

Disetujui: 29 Januari 2021

Tersedia Online: 2 Februari 2021

Kata Kunci:

Smart city, Dimensi, Implementasi, Strategi

Korespondensi:

Tommy Kurnia
Perencanaan Wilayah dan Kota,
Universitas Gadjah Mada,
Yogyakarta, Indonesia

Email:

kurnia.tommy.st@gmail.com

Abstrak: Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu kota yang berhasil dalam mengimplementasikan konsep smart city di Indonesia yang dimulai pada tahun 2014 dan diimplementasikan pada juni 2015. Dalam kurun waktu yang singkat tersebut Provinsi DKI Jakarta telah menerima berbagai macam penghargaan baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional. Hal ini menunjukkan manajemen perkotaan yang lebih baik dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Untuk itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi Provinsi DKI Jakarta melakukan percepatan dalam pembangunan smart city. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data terdiri atas wawancara, observasi lapangan dan pengumpulan data sekunder yang selanjutnya dianalisis melalui teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian ini adalah untuk melakukan percepatan pembangunan smart city di Provinsi DKI Jakarta terdapat enam strategi percepatan diantaranya pembedaan implementasi e-government dengan smart city, kelembagaan pengelola ekosistem smart city, tenaga ahli profesional, kolaborasi swasta, cost social responsibility (CSR) perusahaan swasta dan promosi melalui media sosial.

Copyright © 2018 Departemen Perencanaan dan Desain Institut Teknologi Nasional Yogyakarta
This open access article is distributed under a
Creative Commons Attribution (CC-BY-NC-SA) 4.0 International license.

1. PENDAHULUAN

Urbanisasi menjadi fenomena global yang menjadi menjadi isu yang hampir dibicarakan setiap negara. Menurut PBB, jumlah penduduk diperkirakan bakal meningkat di tahun 2050 hingga 68% tinggal di perkotaan di seluruh dunia (Widyaningrum, 2018). Urbanisasi yang terus terjadi di kota menyebabkan menurunnya kinerja kota yang menyebabkan berbagai permasalahan seiring dengan pesatnya urbanisasi. Kepadatan penduduk yang terus bertambah membuat kota harus siap menghadapi permasalahan-permasalahan seperti kelangkaan sumber daya, munculnya pemukiman-pemukiman kumuh, masalah limbah dan polusi, kemacetan lalu lintas, degradasi lingkungan, merupakan beberapa masalah fisik kota yang ditimbulkan (Widyaningsih, 2013).

Permasalahan tersebut dapat direduksi dengan cara pengelolaan kota secara cerdas dengan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang dibarengi dengan kolaborasi pemerintah, masyarakat dan swasta yang selanjutnya disebut dengan konsep smart city. Menurut (Giffinger, 2007) smart city merupakan sebuah kota yang menatap jauh kedepan dengan manajemen yang baik dengan fokus pada ekonomi, manusia, pemerintahan, pergerakan dan lingkungan yang diajalankan dengan kecerdasan. Oleh karena itu sebuah kota melakukan pengelolaan secara cerdas dengan menerapkan enam dimensi smart city diantaranya smart economy, smart people, smart governance, smart mobility, smart environment dan smart living (Djunaedi et al, 2018).

Konsep smart city telah diimplementasikan berbagai kota di dunia seperti Amsterdam, Barcelona, London, dan Boston. Kota-kota tersebut telah berhasil dalam mengimplementasikan konsep smart city yang disesuaikan dengan permasalahan dan kebutuhan kota itu sendiri. Konsep

smart city selanjutnya juga diimplementasikan di Indonesia yang diinisiasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika yang mencanangkan gerakan 100 kota cerdas. Namun sebelum itu beberapa kota di Indonesia telah lebih dahulu mengimplementasikan konsep smart city seperti Kota Surabaya dan Provinsi DKI Jakarta.

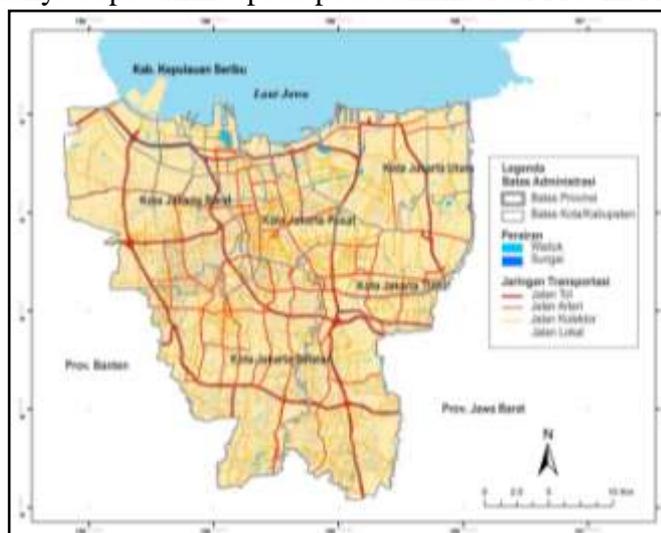
Provinsi DKI Jakarta menyiapkan ekosistem bagi smart city seperti kelembagaan, regulasi dan dokumen rencana pada tahun 2014 yang selanjutnya meluncurkan program Jakarta Smart City (JSC) kepada publik pada tahun 2015. Program Jakarta Smart City memiliki tujuan untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mengetahui, memahami dan mengontrol berbagai sumberdaya yang efisien sehingga dapat memaksimalkan pelayanan publik, menyediakan solusi untuk masalah dan mendukung pembangunan berkelanjutan (Jakarta Smart City, 2019). Untuk mewujudkan tujuan tersebut Provinsi DKI Jakarta mengimplementasikan dimensi smart city secara menyeluruh (holistik) yang dimulai pada Bulan Juni 2015 hingga sekarang.

Atas implementasi dimensi smart city tersebut, Provinsi DKI Jakarta telah menerima berbagai penghargaan, dimana sejak tahun 2014 – 2019 Jakarta Smart City telah menerima 9 penghargaan tingkat nasional dan 2 tingkat internasional. Pada tahun 2019 Provinsi DKI Jakarta juga masuk dalam Top 50 yaitu posisi 47 dari 140 kota Kategori Pemerintah Kota Pintar atau Smart city Government yang berkinerja terbaik oleh Eden Strategy Institute di Singapura. Selain itu pengimplementasian smart city membawa dampak yang signifikan terhadap berbagai permasalahan dimana berdasarkan TomTom Traffic Index pada tahun 2017 Provinsi DKI Jakarta menempati urutan ke 4 kota termacet dari 403 kota didunia dengan rata-rata kemacetan mencapai 61% sementara pada tahun 2018 peringkat tersebut turun menjadi peringkat 7 dan rata-rata kemacetan turun menjadi 53%, hal tersebut mengantarkan Provinsi DKI Jakarta sebagai kota paling maju dalam mengurangi kemacetan dengan penurunan mencapai 8% (Pradewo, 2019).

Berdasarkan hal tersebut menarik untuk diteliti bagaimana strategi Provinsi DKI Jakarta melakukan percepatan dalam pembangunan smart city sehingga menerima berbagai penghargaan di tengah permasalahan perkotaan yang sangat kompleks. Strategi percepatan pembangunan smart city di Provinsi DKI Jakarta diharapkan menjadi model dan best practice bagi provinsi, kota/ kabupaten lainnya di Indonesia yang sedang atau baru memulai pengimplementasian konsep smart city.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan induktif dengan metode kualitatif. Sementara lokasi penelitian adalah Provinsi DKI Jakarta dengan unit analisis program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait pembangunan smart city. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta administrasi Provinsi DKI Jakarta berikut.



Gambar 1. Peta Administrasi Provinsi DKI Jakarta
(sumber: Analisis Peneliti, 2020)

Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara yang dilakukan pada orang yang memiliki pengetahuan terhadap objek yang diteliti diantaranya Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, Unit Pengelola Jakarta *Smart City* dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta menggunakan sampel *snowball sampling*. Selanjutnya pengumpulan data dilakukan dengan cara pengumpulan data sekunder atas dokumen pembangunan dilingkup satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Provinsi DKI Jakarta dan observasi lapangan terhadap objek yang diteliti. Data tersebut selanjutnya dianalisis melalui teknik analisis deskriptif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Jakarta *Smart City*

Jakarta smart city mengimplementasikan konsep smart city secara holistik/menyeluruh dengan fokus pada dimensi smart governance dalam pelayanan publik. Pengimplementasian tersebut didasarkan atas roadmap dan master plan yang dirumuskan dari tahun 2014-2015. Dalam master plan Jakarta Smart City yang berjudul “Jakarta’s Smart city Vision A Megacity on a Mission”, Provinsi DKI Jakarta memiliki fokus terhadap 6 dimensi smart city diantaranya dapat dilihat pada Gambar 2 berikut.



Gambar 2. Masterplan Jakarta *Smart City*

(sumber: Analisis Peneliti, 2020, Deloitte 2016)

Fokus terhadap enam dimensi *smart city* tersebut diwujudkan melalui program *smart city*. Hingga tahun 2019 terdapat 25 program yang telah diimplementasikan Jakarta *Smart City* di antaranya dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Implementasi Jakarta *Smart city*

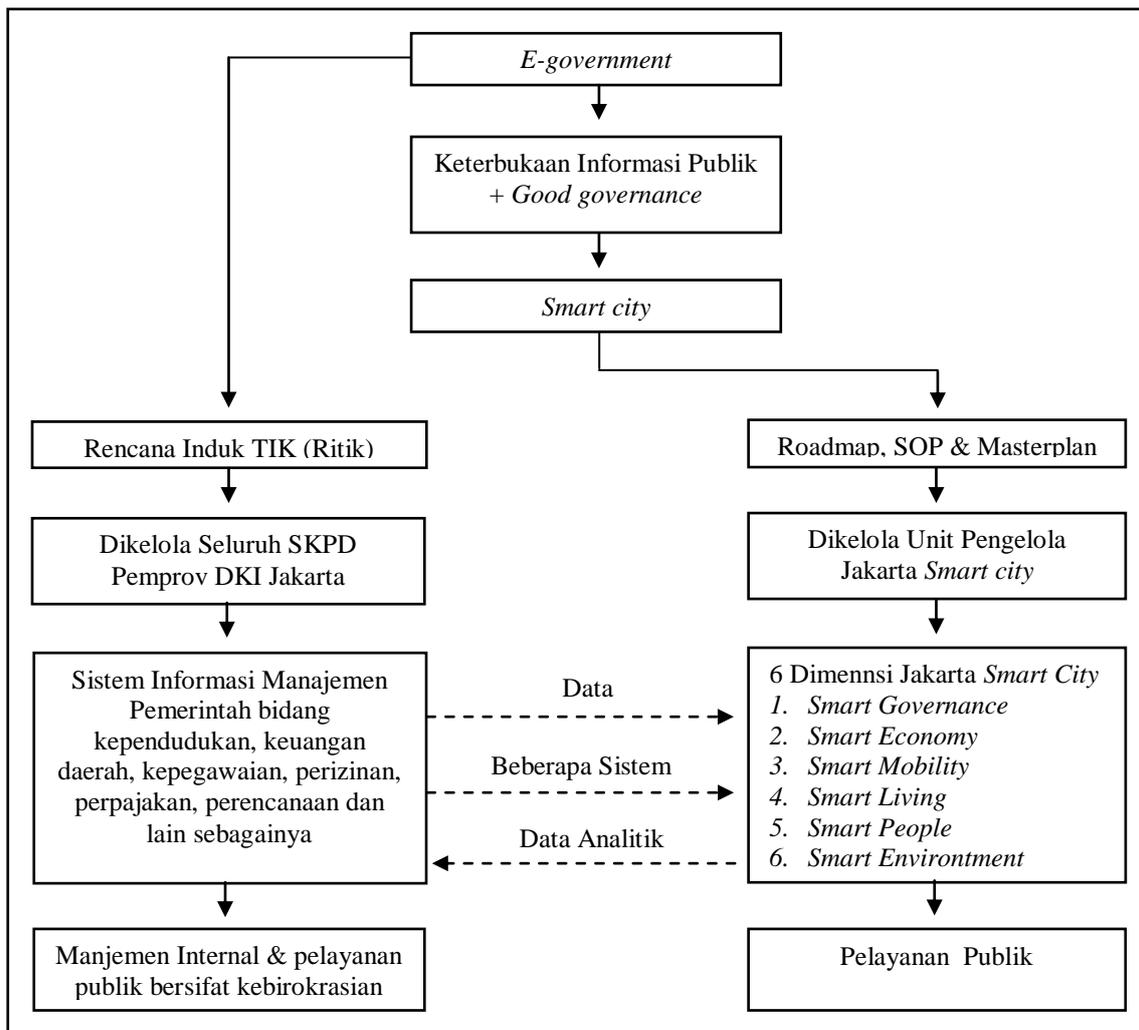
No	Dimensi	Implementasi		
1.	<i>Smart Governance</i>	1. Qlue 2. CROP. 3. Portal Keterbukaan Informasi Publik 4. Ragnan Zoo	5. Kanal Pengaduan 6. CRM 7. API (<i>Application Programing Interface</i>) 8. Pantau Banjir	9. E-Musrenbang/ Plan JKT 10. E-Musrenbang/ Plan JKT 11. i-Jakarta 12. Nodeflux
2.	<i>Smart Economy</i>	1. Zomato 2. Gofood	3. Tokopedia	4. Jakmikro
3.	<i>Smart Mobility</i>	1. Transjakarta “ <i>Smart Mobility for Smart city</i> ”	2. Trafi 3. Waze	4. GoWes
4.	<i>Smart People</i>	1. Indorelawan	2. JSC Hive <i>Coworking Space</i>	3. BERiDE
5.	<i>Smart Living</i>	1. Info Pangan Jakarta	2. Jakarta Aman	
6.	<i>Smart Environment</i>	1. PJU LED <i>Smart System</i>		

(sumber: Hasil Analisis, 2020)

Pengimplementasian dimensi *smart city* secara holistik di beberapa kota di Indonesia berjalan cukup lambat, namun Provinsi Jakarta melakukan beberapa inovasi yang menjadi strategi untuk mempercepat terimplemntasinya program-program yang telah dirumuskan didalam masterplan, strategi tersebut diantaranya pembedaan implementasi *e-government* dengan *smart city*, kelembagaan pengelola ekosistem *smart city*, tenaga ahli professional, kolaborasi swasta, *Corporate social responsibility* (CSR) perusahaan swasta dan promosi melalui media sosial.

3.2 Pembedaan Implementasi *E-Government* dan Jakarta *Smart City*

Dibeberapa kota di Indonesia banyak dijumpai pengimplementasian *smart city* berangkat dari implementasi *e-government*. Kegiatan-kegiatan *e-government* selanjutnya dimasukan dan ditransformasikan kedalam berbagai dimensi *smart city*. Namun hal tersebut berbeda dengan Provinsi DKI Jakarta. Setelah adanya *roadmap* dan perumusan *masterplan smart city*, implementasi *e-government* dipisah dengan implementasi Jakarta *Smart City*. Implementasi *e-government* difokuskan untuk internal pemerintah, sementara Jakarta *Smart City* fokus pada eksternal pemerintah dalam pelayanan publik. Namun kedua implementasi ini tetap terkait, dimana implementasi *e-government* menjadi pendukung implementasi Jakarta *Smart City*. Pembedaan konsep tersebut dapat dilihat pada Gambar 3 berikut.



Gambar 3. Pembedaan Implementasi *E-Government* dan Jakarta *Smart City* (sumber: Hasil Analisis, 2020)

Pembedaan konsep ini bertujuan agar masing-masing implementasi tidak tumpang tindih. Meskipun terdapat fungsi yang sama dalam pelayanan publik, namun pada SKPD pelayanan publik yang dilakukan bersifat birokrasi seperti pelayanan perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu

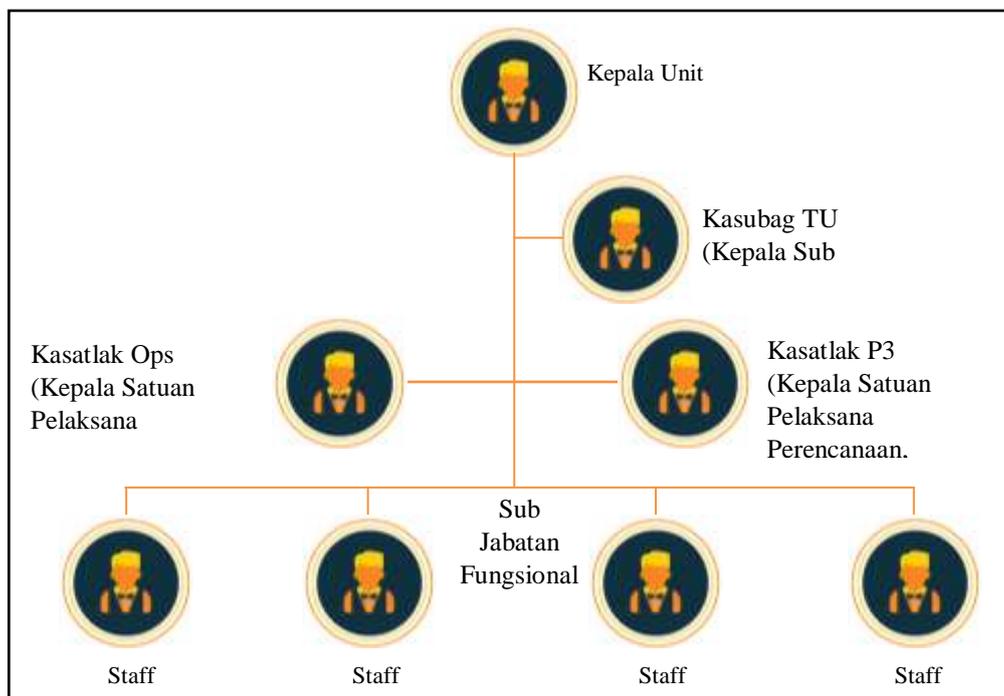
(PTSP) dan pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) sedangkan pelayanan publik pada Jakarta *Smart City* lebih bersifat umum.

3.3 Kelembagaan Pengelola Ekosistem *Smart City*

Pada tahun 2014 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pembahasan tentang bentuk kelembagaan yang sesuai, agar fokus dalam pengelolaan *smart city*. Bentuk kelembagaan yang dipakai adalah Unit Pengelola Teknis (UPT). Unit Pengelola Teknis ini berada dibawah Dinas Komunikasi Informasi dan Kehumasan (Diskominfomas) Provinsi DKI Jakarta selaku pengelola ekosistem TIK. Kelembagaan berbentuk UPT ini mengadopsi bentuk Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan, Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang cukup ramping terdiri atas beberapa aparatur sipil dan tenaga ahli. UPT ini selanjutnya disebut Unit Pengelola Jakarta *Smart City* (JSC) yang menjadi *branding* atas implementasi konsep *smart city* di Provinsi DKI Jakarta.

“UPT merupakan bentuk kelembagaan yang ideal dari pada bentuk kelembagaan lainnya, jika Jakarta Smart city menjadi UPT, mereka bisa fokus dan bisa mengelola anggarannya sendiri, tidak melekat pada anggaran dinas, namun tetap dibawah Diskominfomas, selain itu bentuk UPT akan menghindari substansi kedinasan yang bertingkat, sehingga tidak perlu memakan waktu lama dalam membuat kebijakan”. (Muhammad Fadrian Ilyas, Kepala Subbidang Tata Praja Bidang Pemerintahan, Bappeda Provinsi DKI Jakarta, wawancara 17 Oktober 2019)

Selain itu dapat dilihat bahwa kelembagaan Jakarta *Smart City* memiliki struktur kedinasan yang sangat ramping dimana hanya terdiri atas enam orang pegawai negeri sipil (PNS) dan 80 orang tenaga ahli kontrak yang memiliki keahlian sesuai dengan divisi yang ada pada Unit Pengelola Jakarta *Smart City*. Bentuk kelembagaan Unit Pengelola Jakarta *Smart City* dapat dilihat pada Gambar 4 berikut



Gambar 4. Bagan Kelembagaan Unit Pengelola Jakarta *Smart City*
(sumber: Jakarta *Smart City*, 2019)

Bentuk kelembagaan UPT ini sangat berbeda dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Mayoritas kota/kabupaten dan provinsi di Indonesia mengikuti bentuk kelembagaan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Bentuk Kelembagaan tersebut terdiri dari dewan *smart city* daerah, tim pelaksana *smart city* daerah dan forum pendukung *smart city* yang dikepalai oleh kepala daerah dan di dalamnya terdapat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (), organisasi pemerintah daerah dan melibatkan akademisi. Bentuk kelembagaan tersebut dinilai

lambat dalam melakukan percepatan pembangunan *smart city* karena harus melewati berbagai hierarki birokrasi sementara perkembangan TIK sangat fleksibel.

“Kami melihat bahwa ini nggak bisa disambi dengan bidang-bidang lainnya terutama kami melihat bahwa butuh percepatan atau akselerasi, caranya akselerasi tidak mungkin dengan mengikuti bentuk birokrasi yang lama”. (Setiaji, Kepala Unit Pengelola Jakarta *Smart city* Tahun 2014-2019, wawancara 21 Oktober 2019)

3.4 Tenaga Ahli Profesional

Konsep kelembagaan Unit Pengelola Jakarta Smart City yang mereplikasi bentuk Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan, Pengendalian Pembangunan (UKP4) terbukti berhasil dalam melakukan akselerasi dalam pengembangan smart city. Hal ini tidak lepas dari peranan tenaga ahli di dalam Unit Pengelola tersebut, sebanyak 80 tenaga ahli direkrut dari berbagai bidang yang selanjutnya dibagi atas 5 divisi yang memiliki berbagai fungsi. Kehadiran tenaga ahli ini menciptakan kolaborasi antara birokrasi dan kalangan profesional sehingga program-program yang diimplementasikan tidak kaku dan berkonsep terbaru atau kekinian dan dapat dengan mudah diterima masyarakat. Tenaga ahli dalam Unit Pengelola Jakarta Smart City dibagi atas lima divisi diantaranya:

a. Divisi Lapangan

Memiliki beberapa fungsi seperti pengecekan lapangan atas program utama Provinsi DKI Jakarta dan program gubernur, memantau command centre, merespon pengaduan pada kanal pengaduan, sosialisasi program utama dan input data sekaligus pemutakhiran data.

b. Divisi Data dan Analisis

Memberikan wawasan dan informasi baru dalam pengambilan keputusan melalui hasil analisis data.

c. Divisi Pengembangan

Melakukan pengembangan website dan aplikasi sekaligus merancang dan membangun sistem jaringan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

d. Divisi Komunikasi

Mensosialisasikan konsep informasi dan kebijakan yang ada pada Jakarta Smart City kepada berbagai pihak yang informatif melalui berbagai media.

e. Divisi Monitoring dan Evaluasi

Melakukan analisa terhadap kebutuhan dan kesesuaian program Jakarta Smart City untuk meningkatkan pelayanan publik.

Tenaga ahli yang didominasi oleh tenaga muda juga memberikan semangat dan inovasi baru dengan keinginan belajar yang tinggi sehingga di dalam Unit Jakarta Smart City dan tidak terlihat seperti birokrasi pada umumnya, namun lebih kepada ruang kerja dan diskusi yang diisi oleh milenial. Sentuhan milenial juga dapat dilihat dari berbagai program Unit Pengelola Jakarta Smart city seperti adanya program Ngobrol Jakarta yang merupakan acara diskusi yang melibatkan masyarakat, startup dan pemerintah daerah di JSC Hive Coworking Space. Keberadaan tenaga ahli juga mendorong banyaknya event dan promosi yang dilakukan secara kreatif yang didukung oleh visual tinggi untuk menarik minat masyarakat.

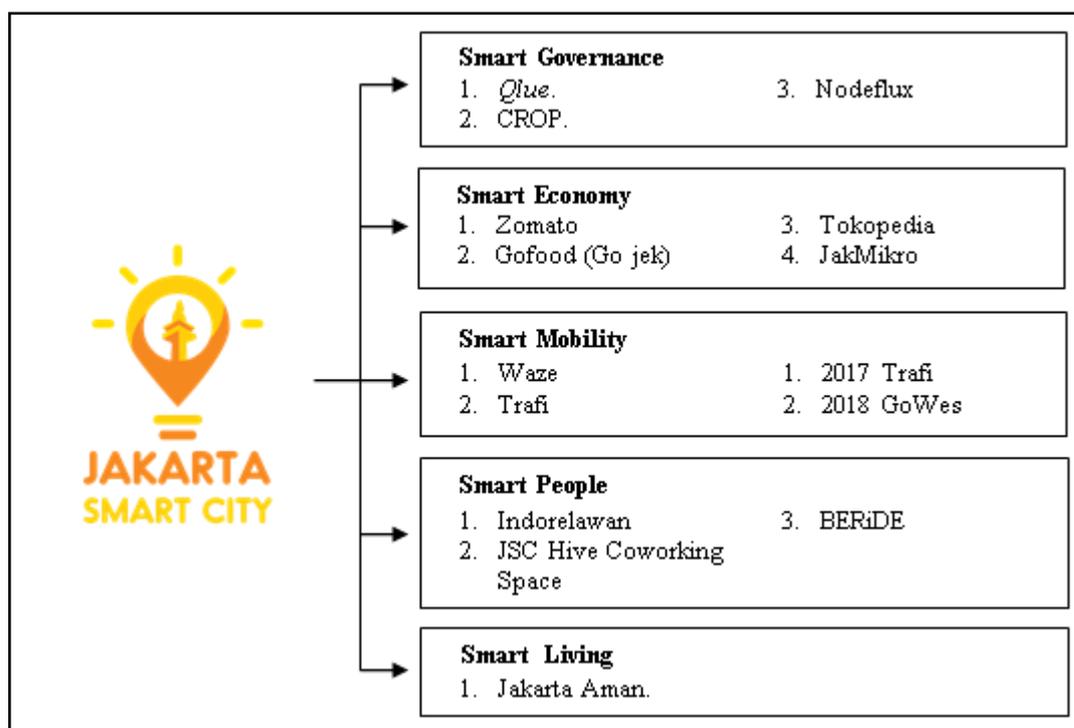
3.5 Kolaborasi Swasta

Provinsi DKI Jakarta merupakan pusat perekonomian dan bisnis di Indonesia, dimana terdapat berbagai macam jenis usaha yang dikelola swasta baik lokal maupun internasional. Banyaknya jenis usaha ini membuat tingkat persaingan semakin tinggi dan menuntut perusahaan untuk melakukan inovasi lebih, hal ini juga terjadi pada perusahaan yang bergerak dibidang TIK yang terus berkembang khususnya pada bidang aplikasi. Perkembangan pesat dunia usaha pada bidang TIK tersebut direspon baik oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan kerjasama dengan swasta dalam penyediaan aplikasi pelayanan publik.

Kolaborasi yang dilakukan dengan swasta bersifat non profit berbentuk uang namun bersifat endorsement dan Provinsi DKI Jakarta menjadi playground data bagi swasta yang terdiri dari startup dan perusahaan besar.

“Di balik penyediaan aplikasi dan segala macamnya, backbonenya ada di data, Mas. Para startup dan perusahaan mengolah data yang udah kami sediakan untuk keperluan mereka, nanti datanya bisa diolah jadi berbagai macam, selain itu mereka juga melihat JSC ini strategis terutama untuk pemasaran produk mereka nantinya”. (Aang Jatnika, Divisi Monitoring & Evaluasi Unit Pengelola Jakarta smart city, wawancara 10 Oktober 2019)

Dengan adanya kolaborasi diberbagai dimensi smart city, Unit Pengelola Jakarta Smart City tidak perlu lagi mengembangkan aplikasi baru, yang tentunya membutuhkan anggaran dan pengenalan lagi kepada masyarakat. Unit Pengelola Jakarta Smart City cukup memanfaatkan berbagai aplikasi yang sudah ada dan booming ditengah masyarakat seperti aplikasi penyediaan e-commerce oleh Tokopedia dan lain sebagainya. Hingga tahun 2019 terdapat 15 program yang dikolaborasikan dengan startup dan perusahaan besar di antaranya dapat dilihat pada Gambar 5 berikut.



Gambar 5. Kolaborasi Program Jakarta *Smart City* dengan Swasta
(sumber: Hasil Analisis, 2020)

3.6 Corporate Sosial Responsibility (CSR) Perusahaan Swasta

Dalam penyediaan berbagai infrastruktur smart city tidak semuanya disediakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan hasil kolaborasi dengan swasta. Melainkan juga berupa Corporate Social Responsibility (CSR). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan persyaratan perizinan bagi perusahaan mikrosel yang akan mendirikan tiang atau menara Base Transceiver Station (BTS) selalu menyediakan CCTV pada infrastruktur tersebut yang memiliki fungsi sebagai pemantau real time oleh perusahaan dan diintegrasikan dengan Unit Pengelola Jakarta Smart City. CCTV selanjutnya dapat diakses oleh masyarakat melalui website Jakarta Smart City dan data dari CCTV dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk dilakukan analisis lebih lanjut sebagai dasar membuat kebijakan.

3.7 Promosi Melalui Media Sosial Mainstream

Media sosial digunakan masyarakat dalam bersosialisasi, mencari informasi, hiburan hingga sebagai media usaha yang menghasilkan keuntungan. Pada saat ini keberadaan media sosial yang dapat diakses dengan mudah melalui smartphone tidak lagi menjadi kebutuhan sesaat namun sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu Unit Pengelola Jakarta Smart City juga memanfaatkan media sosial dalam memberikan informasi dan promosi secara gratis dan tidak

adanya batasan sehingga tidak hanya dapat diakses masyarakat DKI Jakarta namun juga masyarakat dunia.

“Jakarta Smart city itu emang UPT mas, tapi powernya lebih kuat dari Pemprov Jakarta, bisa dilihat sosial media dan websitenya paling banyak dicari dan dilihat orang dibanding punya Jakarta lainnya”. (Muhammad Fadrian Ilyas, Kepala Subbidang Tata Praja Bidang Pemerintahan, Bappeda Provinsi DKI Jakarta, wawancara 17 Oktober 2019)

Pada dasarnya Unit Pengelola Jakarta Smart City adalah jembatan hubungan pemerintah dan masyarakat, sehingga dalam memberikan informasi memanfaatkan media sosial yang sering diakses masyarakat seperti Instagram, Youtube, Twitter dan Facebook. Seperti media sosial pada umumnya, masyarakat juga dapat berinteraksi dengan admin yang dikelola divisi informasi Unit Pengelola Jakarta Smart city, sehingga informasi yang diberikan sudah dua arah yang disajikan dalam bentuk kalimat, grafik, gambar hingga video tergantung media sosial apa yang dimanfaatkan.

Pemanfaatan media sosial mulai terlihat sejak awal implementasi smart city, karena berbagai produk Unit Pengelola Jakarta Smart City sudah dapat dimanfaatkan masyarakat sehingga diperlukan media untuk mempromosikan secara cepat. Selain itu di dalam media sosial Unit Pengelola Jakarta Smart City tidak hanya memberikan informasi dan promosi terkait program smart city saja namun juga berbagai program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

4. KESIMPULAN

Untuk mempercepat pembangunan smart city, Provinsi DKI Jakarta melakukan enam strategi yang berkaitan dengan pembedaan konsep, kelembagaan, sumberdaya pengelola, kolaborasi, infrastruktur dan media promosi. Keenam strategi tersebut sukses memacu perkembangan konsep smart city yang diinginkan oleh Provinsi DKI Jakarta hingga menerima berbagai penghargaan baik di tingkat nasional maupun internasional. Namun terdapat berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi Jakarta Smart City seperti kekurangan sumberdaya pengelola yang harus bersaing dengan perusahaan swasta dan isu politik ibukota yang berpengaruh terhadap beberapa program Jakarta Smart City.

5. SARAN

Penelitian ini dilakukan pada Provinsi DKI Jakarta yang yang berhasil dalam mempercepat pembangunan konsep smart city melalui berbagai macam strategi, oleh karena itu penelitian sejenis dapat dilakukan pada daerah lainnya di Indonesia dan dunia yang berhasil melakukan akselerasi dalam pembangunan smart city baik terhadap keseluruhan dimensi smart city (holistik) maupun terhadap salah satu dimensi *smart city*, sehingga dapat dilihat apakah strategi yang digunakan sama atau terdapat strategi baru dalam mempercepat pembangunan smart city.

6. UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan selesainya penelitian ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

- a. Prof. Ir. Achmad Djunaedi, MUP.,Ph.D, selaku dosen pembimbing penelitian dan dosen pengampu mata kuliah *Smart City* di Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Gadjah Mada.
- b. Setiaji, selaku Kepala Unit Pengelola Jakarta *Smart City* tahun 2015-2019 dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat tahun 2019-sekarang.
- c. Muhammad Fadrian Ilyas, selaku Kepala Sub Bidang Tata Praja Bidang Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta.
- d. Aang Jatnika, selaku Kepala Divisi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Unit Pengelola Jakarta *Smart City*.
- e. Ahmad Suhairi, selaku Kepala Seksi Standar Pelayanan *E-Government* Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi DKI Jakarta.

f.Fatih Alfalih, selaku tim Divisi Lapangan dan Operasional Unit Pengelola Jakarta *Smart City*.

7. REFERENSI

- Deloitte. (2016). *Jakarta's Smart City vision - A megacity on a mission*. (March).
- Djunaedi et al, A. (2018). *Membangun Kota dan Kabupaten Cerdas: Sebuah Panduan Bagi Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Giffinger, R. (2007). *Smart cities Ranking of European Medium-Sized Cities* (Vienna, Ed.). [https://doi.org/10.1016/S0264-2751\(98\)00050-X](https://doi.org/10.1016/S0264-2751(98)00050-X)
- Jakarta Smart City. (2019). Jakarta Smart City. Retrieved April 29, 2019, from Pemerintah Daerah DKI Jakarta, UPT Jakarta Smart City website: <http://interactive.smartcity.jakarta.go.id/>
- Pradewo, B. (2019). Survei TomTom: Jakarta Alami Penurunan Kemacetan Terbesar di Dunia. Retrieved from JawaPos.com website: <https://www.jawapos.com/jpg-today/17/06/2019/survei-tomtomb-jakarta-alami-penurunan-kemacetan-terbesar-di-dunia/>
- Widyaningrum, G. L. (2018). PBB: 68% Populasi Dunia Akan Tinggal di Area Perkotaan Pada 2050. Retrieved from National Geographich Indonesia website: <https://nationalgeographic.grid.id/read/13673071/pbb-68-populasi-dunia-akan-tinggal-di-area-perkotaan-pada-2050?page=all>
- Widyaningsih, D. (2013). *Kota surabaya menuju smart city*. Universitas Gadjah Mada.